

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada di dunia. Dengan jumlah penduduk mencapai dua juta jiwa orang menyebabkan berbagai masalah yang timbul akibat tidak meratanya penyebaran pembangunan khususnya di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Mulai dari masalah kesehatan, kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, hingga urbanisasi dengan semua efeknya. Untuk mengurangi dampak negatif berantai ini diperlukan suatu upaya nyata dari pemerintah. Upaya yang bisa dilakukan salah satunya dengan mengembangkan UMKM.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengamatkan pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui penciptaan iklim yang kondusif, pemberi kesempatan berusaha, dukungan dan perlindungan, serta pengembangan usaha seluas-luasnya.¹ Itu artinya UMKM mempunyai kedudukan, peran serta potensi yang sangat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya bisa mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tengah dirasakan membuat peluang dan tantangan bagi masyarakat serta kondisi

¹ Staf Bank Indonesia. Laporan analisis kinerja UMKM 2010-2013. hal 33 (diakses dari website bi.go.id pada 20 Maret 2016)

perekonomian Indonesia. Pasalnya arus barang, jasa, maupun tenaga kerja bebas masuk begitu saja. Masyarakat lebih dituntut untuk lebih mandiri dalam menghadapi persaingan. Dengan begitu peran masyarakat membentuk UMKM menjadi penting. Dengan era MEA ini para pelaku UMKM bisa memperluas daerah pemasaran hingga luar negeri, dan bisa menumbuhkan peluang untuk investor asing yang akan mendanai UMKM di Indonesia. Namun, tantangan terbesarnya adalah daya saing UMKM dengan produk impor yang bebas masuk. Untuk itu diperlukan keterampilan dan penerapan teknologi serta modal dalam pengembangan usaha.

Pada dasarnya UMKM bersifat padat karya, jenis usaha mikro (UMi) dan usaha kecil masih tergolong dalam usaha padat karya yang mana akan menggunakan modal manusia lebih banyak dibandingkan modal capital. Sebaliknya usaha menengah dan usaha besar tergolong kedalam usaha yang membutuhkan modal kapital relatif tinggi dibandingkan modal tenaga kerja. Namun tetap saja usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar membutuhkan modal usaha untuk memulainya. Untuk itu dibutuhkan bantuan modal berupa kredit modal kerja maupun kredit investasi untuk mengembangkan UMKM.

Tabel I.1 Jumlah Unit Usaha UMKM

Unit Usaha	2011	2012	2013
Usaha mikro (Umi)	54.559.969	55.534.592	57.189.393
Usaha kecil (UK)	602.195	629.418	654.222
Usaha menengah (um)	44.280	48.997	52.106
Total	55.206.444	56.534592	57.895.721

Sumber : pusat data Kementerian Koperasi dan UMKM

Jumlah unit UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia yang terlihat dari tabel I.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa UMKM semakin lama mengalami kenaikan jumlah unit. UMKM yang menjadi daya tahan perekonomian bagi Indonesia saat krisis. Jumlah unit yang semula hanya 55 juta unit saat 2011 mengalami kenaikan sebesar 1 juta unit tiap tahunnya hingga tahun 2013. Mampu bertambahnya unit UMKM ini tidak jauh dari bantuan modal. Sektor UMKM mendapat bantuan modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan masuknya investasi pada sektor UMKM yang dilansir dari badan koordinasi penanaman modal (BKPM), Uni Eropa merupakan satu-satunya penyalur dana bantuan di Indonesia pada tahun 2014 dengan nilai investasi sebesar 3,8 miliar dolar AS. Banyaknya dana investasi ini pun dirasa masih kurang untuk mendanai UMKM karena tidak menyebar keseluruh wilayah Indonesia, lagipula dana tersebut hanya ditujukan pada 6 provinsi yakni Maluku, Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).² Dana langsung yang masuk ini nilainya tentu kurang untuk mengembangkan UMKM agar lebih tumbuh. Dari 57,9 juta unit usaha UMKM di Indonesia hanya 39,18% atau sekitar 22,15 juta unit usaha yang memperoleh akses permodalan dari perbankan.³ Hal ini karena persyaratannya terlalu berat. Menurut ketua umum HIPPI, salah satu syarat yang

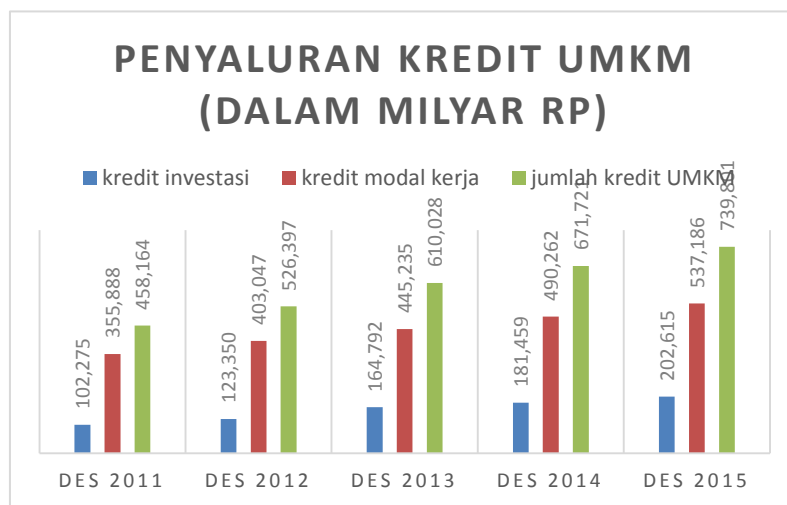
² Rio Dermawan. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160212234354-92-110675/dorong-ukm-indonesia-uni-eropa-gelontorkan-rp150-miliar/> (diakses pada selasa, 16 februari 2016 pukul 19.00)

³ Andi. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/22/190000226/UU.Penjaminan.Bantu.UMKM.Dapat.an.Akses.Kredit.Jasa.Konsultasi.dan.Jasa.Manajemen> (diakses pada selasa, 19 April pukul 4.02)

⁴ Syaiful. <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/05/14/o75ohy394-hippi-minta-perbankan-permudah-penyaluran-kredit-untuk-umkm> (diakses pada selasa, 19 April pukul 4.12)

memberatkan yakni mengenai lama usaha yang sudah dijalankan calon debitur biasanya bank mau menyalurkan kredit bila usaha telah berjalan 2 tahun dan anggungan yang diberikan itu harus setara nilainya dengan jumlah pinjaman yang diajukan.⁴

Sementara bantuan modal dari dalam negeri biasanya berupa kredit dan subsidi dari pemerintah. Kredit yang disalurkan perbankan berdasarkan penggunaan dibagi menjadi tiga yakni kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit yang paling banyak disalurkan yakni kredit modal kerja pada UMKM sementara kredit investasi angkanya masih rendah dibandingkan kredit modal kerja. Hal ini ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



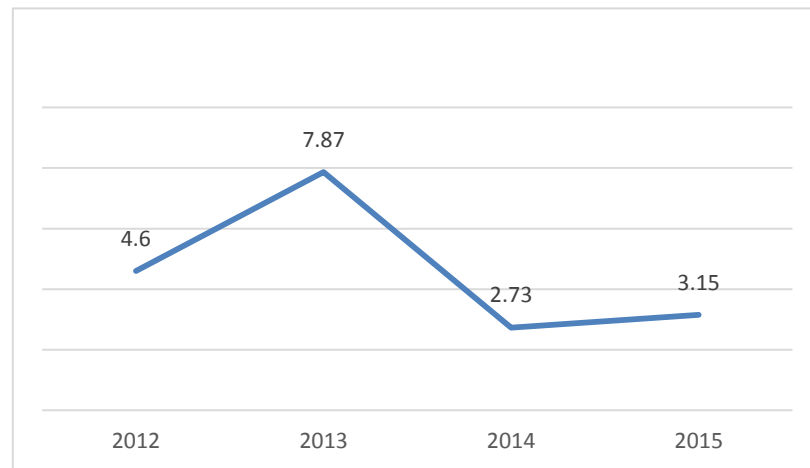
Sumber : *bi.go.id* diolah peneliti

Gambar I.1 Penyaluran kredit UMKM

Pada gambar diatas jelas terlihat kredit investasi masih sangat jauh bedanya bila dibandingkan kredit modal kerja. Mulai tahun 2011 kredit investasi

hanya 102,275 milyar rupiah sedangkan kredit modal kerja sebesar 355,888 milyar rupiah. Kemudian tahun 2012 terjadi kenaikan kredit investasi sebesar 123,350 milyar rupiah dan kredit modal kerja 403,047 milyar rupiah dengan jumlah total kredit sebesar 526,397 milyar rupiah. Tahun 2013 kenaikan jumlah total kredit sebesar 610,028 milyar rupiah dengan jumlah kredit investasi sebesar 164,792 milyar rupiah dan kredit modal kerja sebesar 445,235 milyar rupiah. Jumlah total kredit juga meningkat pada tahun 2014 yakni 671,721 milyar rupiah, dan diikuti meningkatnya kredit investasi sebesar 181,459 dan kredit modal kerja sebesar 490,262 milyar rupiah. Pada tahun 2015 total jumlah kredit yang disalurkan sebesar 739,801 milyar rupiah, namun hanya 202,615 milyar rupiah yang disalurkan untuk tujuan kredit investasi. Jumlah kredit yang disalurkan antara kredit investasi dan kredit modal terlihat bedanya hingga 2 kali lipat dimana angka kredit investasi hanya setengahnya dari kredit modal kerja. Hal ini karena kredit investasi dianggap oleh perbankan sebagai kredit jangka panjang dimana kredit yang berjangka waktu lebih 3 tahun sehingga pihak perbankan bersikap hati-hati dalam memberikan kreditnya karena resiko gagal bayarnya lebih tinggi bila disalurkan pada kredit jangka panjang. Padahal kredit investasi berpengaruh besar terhadap perluasan unit UMKM. Dengan meningkatnya jumlah kredit investasi yang disalurkan pada UMKM, tentunya UMKM mampu membeli barang-barang modal dan memperbesar unit usaha serta memperlebar usahanya. Hal ini UMKM memiliki peran besar yang amat strategis sebagai alat pembangunan ekonomi Nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan perekonomian juga mengurangi angka pengangguran.

Dari gambar I.1 diatas angka dalam rupiah yang disalurkan perbankan untuk kredit investasi dari setiap tahun meningkat namun laju pertumbuhannya cenderung fluktuatif dengan ditunjukkan oleh gambar dibawah ini :



sumber : diolah peneliti

Gambar I.2 Laju Pertumbuhan Kredit Investasi UMKM (dalam persentase)

Dari gambar I.2 diatas terlihat bahwa naiknya jumlah kredit investasi yang disalurkan namun laju pertumbuhannya fluktuatif. Tahun 2011-2012 laju kenaikan kredit investasi hanya sebesar 4.6 persen. Lalu tahun 2012-2013 terjadi kenaikan laju pertumbuhan kredit investasi sebesar 7.87 persen. Kemudian 2013-2014 terjadi penurunan laju pertumbuhan kredit investasi sebesar 2.73 persen walaupun angka penyaluran kreditnya naik menjadi 671,721 milyar rupiah dari tahun lalu sebesar 610,028 milyar rupiah namun kredit yang disalurkan menurun 2.73 persen atau hanya bertambah 61,693 milyar rupiah saja. Dan terakhir tahun 2014-2015 laju pertumbuhan kredit investasi naik kembali menjadi 3.15 persen.

Perbankan sebagai salah satu pihak yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat memiliki tugas untuk memberikan kredit bagi pihak yang

membutuhkan terutama bagi sektor UMKM. Dengan terbitnya Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang penjaminan bagi UMKM, undang-undang ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank perbankan maupun non perbankan.⁵ Namun perlu dipastikan pula terkait kondisi internal dan eksternal perbankan agar bisa menyalurkan dananya.

Menurut penelitian **Agus Murdiyanto (2012)** ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penentuan penyaluran kredit perbankan yakni faktor internal yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*. Sedangkan faktor eksternalnya yakni Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan dana pihak ketiga (DPK).⁶

Salah satu faktor internal perbankan yang bisa mempengaruhi penyaluran kredit yakni *Non Performing Loan (NPL)*. NPL dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengurangi risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.

⁵Dani.<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/05/22/190000226/UU.Penjaminan.Bantu.UMKM.Dapatkan.Akses.Kredit.Jasa.Konsultasi.dan.Jasa.Manajemen> (diakses pada Selasa, 19 April pukul 4.02)

⁶ Agus Murdiyanto. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan Penyaluran Kredit Perbankan Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2006 – 2011. CBAM-FE UNISSULA Vol. 1 No. 1 Desember 2012 hal 61 - 75

Tahun	Kredit UMKM (milyar rupiah)	NPL (%)
2011	17443,3	3,63
2012	18766,7	3,4
2013	21448,1	3,35
2014	31449,7	4,1
2015	36462,3	4.39

Tabel I.2 Jumlah NPL kredit UMKM

Sumber : bi.go.id diolah oleh peneliti

Tabel I.2 diatas menunjukkan jumlah kredit UMKM disertai nilai NPL. Kenaikan jumlah kredit UMKM secara nasional yang diikuti dengan kenaikan NPL. Pada tahun 2011 jumlah kredit UMKM sebesar 17443,3 milyar rupiah dengan nilai 3,63%. Tahun berikutnya nilai kredit mengalami kenaikan yaitu sebesar 18766,7 milyar rupiah namun persentase NPL mengalami penurunan, hal ini menunjukkan kondisi resiko gagal bayar oleh UMKM menurun sehingga perbankan menganggap hal ini sebagai peluang untuk mendapatkan laba lebih besar dengan menaikkan kredit yang akan disalurkan pada tahun berikutnya. Melihat peluang emas tersebut perbankan terus menaikkan penyaluran kreditnya pada UMKM hingga tahun 2015. Tahun 2013 jumlah penyaluran kredit naik menjadi 21448,1 milyar rupiah diikuti penurunan persentase NPL sebesar 3,35%. Semakin giat perbankan menyalurkan dananya untuk UMKM, pada tahun 2014 kenaikan kredit yang disalurkan sebanyak 10000 milyar rupiah dari tahun sebelumnya, namun tingkat resiko kredit naik menjadi 4.1%. Hal ini dirasa kurangnya manajemen kredit yang dilakukan oleh perbankan.

Faktor internal lainnya yakni *capital adequacy ratio* (CAR). Menurut Dendawijaya dalam jurnal Febri Amitha, CAR adalah “Risiko yang

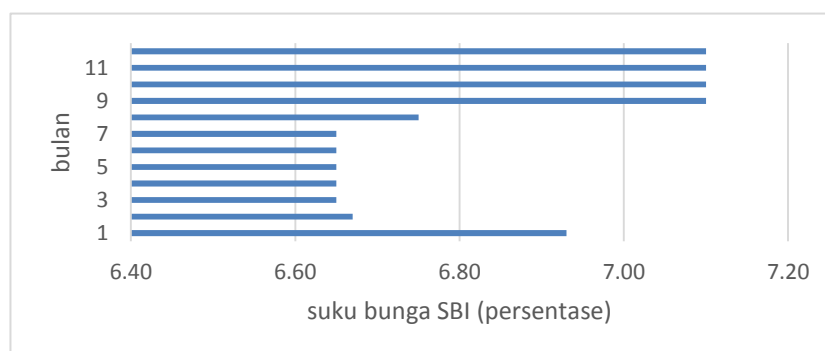
memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana – dana dari sumber – sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain – lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.⁷ Kredit bermasalah juga dapat dipengaruhi dari CAR. Jika CAR yang dimiliki pada suatu bank menurun maka mengakibatkan menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, karena bank dapat kehilangan kemampuan dalam menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan pokoknya.

Faktor eksternal perlu dipertimbangkan bagi pihak perbankan yakni suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan dana pihak ketiga (DPK). Keberadaan perbankan yang mempunyai 2 tugas operasional yakni tugas dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan tugas mengalokasikan dana tersebut sehingga bank mendapatkan laba. Terkait tugas pertama, perbankan harus mampu menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya. Dana–dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana-dana yang telah diterima tersebut merupakan dana pihak ketiga. Oleh sebab itu semakin besar Dana Pihak Ketiga yang diterima maka semakin meningkat peranan bank dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana

⁷ Febry Amithya Yuwono, Wahyu Meiranto, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets*, Dan Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-14

dalam bentuk pemberian kredit. Mayoritas UMKM yang ada di Indonesia sumber pembiayaannya berasal dari kredit perbankan. Sehingga kredit diharapkan mampu memperbanyak jumlah UMKM.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan rupiah. Bank Indonesia dapat menjual SBI agar dapat menyerap kelebihan uang primer yang telah beredar. Juga memiliki peranan tersendiri dalam pemberian kredit yang akan dilakukan. Tingkat suku bunga pada penjualan SBI ditentukan melalui sistem lelang. Selain itu SBI merupakan instrument dianggap paling aman untuk menempatkan dana bagi bank umum karena memiliki tingkat resiko yang rendah. Dengan tingginya suku bunga SBI yang diterbitkan menarik perhatian pihak bank untuk memilih menyimpan cadangan dananya dengan membeli surat berharga tersebut dibandingkan harus menyalurkan dananya melalui kredit.



Sumber : *bi.go.id* diolah peneliti

Gambar I.3 Suku Bunga SBI Tahun 2015

Gambar I.3 diatas menampilkan suku bunga SBI dari bulan Januari hingga Desember tahun 2015. Pada awal tahun suku bunga SBI sebesar 6.93%. Namun bulan selanjutnya hingga Juli suku bunga SBI turun hingga 6.65%. Namun

Agustus hingga desember suku bunga SBI naik menjadi 7.10%. Tingginya suku bunga SBI tersebut menarik minat perbankan untuk lebih memilih menempatkan dananya pada surat berharga ini. Hal ini sejalan dengan laporan berita oleh Pikiran Merdeka, dalam berita tersebut disebutkan bahwa salah satu bank pemerintah di Aceh dalam laporan neraca keuangan dan laporan laba ruginya lebih memfokuskan menyalurkan dananya untuk kredit konsumtif dan membeli Sertifikat Bank Indonesia sehingga dana yang disalurkan pada UMKM hanya 6% dari total kredit yang disalurkan.⁸ Bank Aceh lebih memilih mencadangkan dananya pada SBI yang dikeluarkan pemerintah karena suku bunga sangat tinggi yakni mencapai 7.10%. Tingginya suku bunga SBI membuat penyaluran kredit untuk UMKM menjadi rendah.

Dari latar belakang diatas maka peneliti akan mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM seperti dana pihak ketiga, suku bunga SBI, NPL, serta CAR.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data dan fakta yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi UMKM di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
2. Tingginya dana pihak ketiga (DPK)
3. Tingginya suku bunga SBI

⁸ <http://pikiranmerdeka.co/2016/04/29/bank-aceh-bank-peternak-uang> (diakses pada Selasa 19 April 2016 pukul 05.00)

4. Besarnya nilai persentase *non performing loan* (NPL)

C. Pembatasan Masalah

Adapun dari identifikasi masalah tersebut, masalah penyaluran kredit investasi pada UMKM memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubungan dengan keterbatasan yang di miliki peneliti dari segi dana, waktu, dan tenaga maka penelitian ini di batasi pada masalah pengaruh suku bunga SBI dan *Non Performing Loan* terhadap penyaluran kredit investasi sektor UMKM di Indonesia tahun 2011-2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan diatas dan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh suku bunga SBI terhadap Penyaluran Kredit Investasi sektor UMKM Di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Loan* terhadap Penyaluran Kredit Investasi sektor UMKM Di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh suku bunga SBI, dan *Non Performing Loan* Terhadap Penyaluran Kredit Investasi sektor UMKM Di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoretis

- a. Mengembangkan pengetahuan mengenai suku bunga SBI dan NPL yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit Investasi UMKM di Indonesia.
 - b. Menambah wawasan mengenai suku bunga SBI dan NPL yang dapat mempengaruhi permintaan kredit Investasi UMKM di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
- a. Sebagai tulisan yang dapat dipertimbangkan atau masukkan bagi pemerintah Indonesia terutama kepada pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan-kebijakan yang melindungi perekonomian Indonesia juga menjaga stabilitas perbankan guna melancarkan penyaluran kredit investasi UMKM.
 - b. Memberi gambaran kondisi perekonomian dalam negeri sehingga masyarakat dapat terdorong untuk menyimpan dananya pada bank sehingga nantinya dapat disalurkan berupa kredit investasi pada UMKM.